



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Jalan Otto Iskandardinata No. 53-55 Jakarta Kode Pos 13330  
Telepon : (021) 8190410 Faksimile : (021) 8195583  
Website [www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id)

**NOTA DINAS**

Nomor : ND- 950 /WPB.12/2018

Yth. : Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan  
Dari : Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2018  
Tanggal : 12 November 2018

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun Kajian Fiskal Regional secara triwulanan.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2018 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
2. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal
3. Gubernur DKI Jakarta c.q. Kepala Biro Perekonomian



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan III  
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Rina Robiati | Ketua Tim: Dewi Yanti |  
Editor: Lia Amalia | Desain Grafis: Wulandari | Anggota:  
Saifudin Ali | Yusron |

**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN**

**Provinsi DKI Jakarta**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL</b> .....	<b>1</b>
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	2
C. Indikator Kesejahteraan.....	2
<b>II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN</b> .....	<b>4</b>
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	8
C. Prognosis Realisasi APBN.....	10
<b>III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD</b> .....	<b>11</b>
A. Pendapatan Daerah.....	12
B. Belanja Daerah.....	15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018.....	17
<b>IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)</b> .....	<b>18</b>
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	18
B. Pendapatan Konsolidasian.....	18
C. Belanja Konsolidasian.....	21
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto.....	23
<b>V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH</b> .....	<b>25</b>
A. Dampak Ekonomi Pelaksanaan Asian Games 2018 Capai Rp 45 Triliun .....	25
B. Kemiskinan DKI Terendah Sejak Empat Tahun Terakhir.....	25

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada triwulan III 2018, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dari PDB Nasional yaitu sebesar 17,51%. PDRB triwulan III 2018 diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai 679,71 triliun rupiah, sementara menurut harga konstan mencapai 442,39 triliun rupiah.

Dampak Asian Games yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus s.d. 2 September 2018 berpengaruh ke berbagai sektor Lapangan Usaha yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan dan Jasa Hiburan.

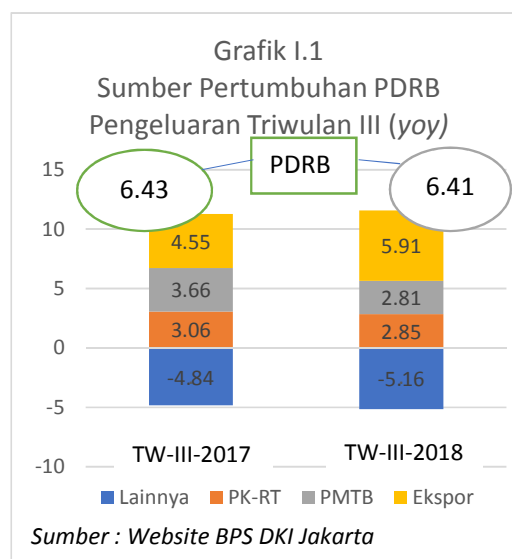
Struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2018 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,39%, Industri Pengolahan sebesar 13,03%, Konstruksi sebesar 12,91% dan Jasa Keuangan sebesar 9,95%.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi Triw-III Tahun 2018 terhadap Triw-III Tahun 2017 (y-o-y).

Ekonomi Jakarta pada triwulan III-2018 tumbuh 6.41%, lebih rendah 0,02% bila dibandingkan dengan triwulan III-2017 yang mencapai sebesar 6,43%. Capaian ini masih tetap dalam batas proyeksi yang telah ditetapkan dalam RKPD yaitu antara 6,12-6,52%. Namun demikian PDRB DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan PDB Nasional yang sebesar 5,17%, dan menempati peringkat 10 secara Nasional.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11.69%, sedangkan sumber pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi dan Perdagangan Besar dan Eceran.

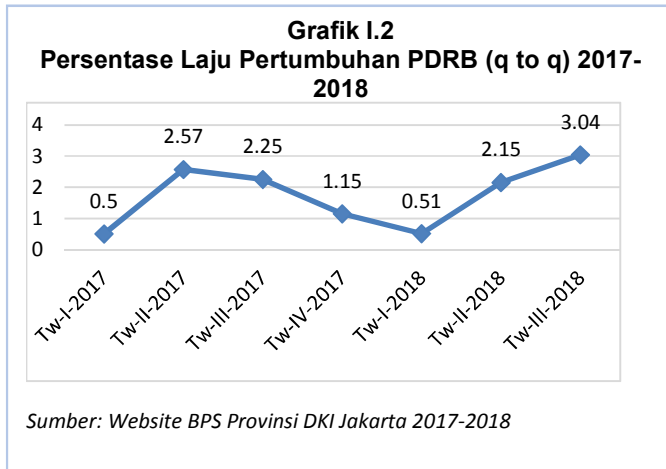
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif terjadi pada seluruh komponen dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor sebesar 15,67%, dimana ekspor produk DKI Jakarta berdasarkan sektor didominasi oleh sektor industri Pengolahan, pada bulan Juli sebesar



97,84%, Agustus 93,81%, dan September 95,56%. Namun demikian laju Impor juga masih tinggi di kisaran 5,71%.

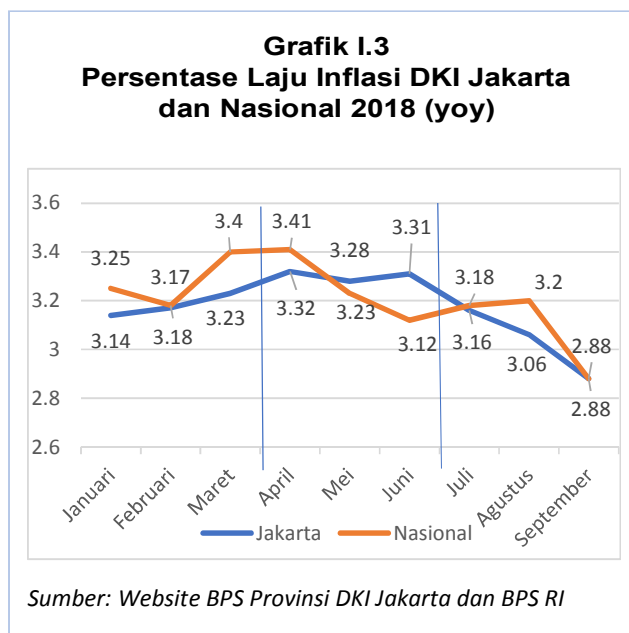
## 2. Pertumbuhan ekonomi Triw- III Tahun 2018 terhadap Triw-II Tahun 2018 (q to q).

Ekonomi Jakarta triwulan III-2018 tumbuh sebesar 3,04%, lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan terutama didorong oleh Komponen Ekspor yang tumbuh sebesar 16,39%, menyumbang 5,95 basis poin namun terkoreksi oleh pertumbuhan impor sebesar 6,25 basis poin.



## B. Inflasi

Pasca Lebaran, laju inflasi Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli, Agustus dan September 2018 mengalami penurunan dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, sebagaimana dapat kita lihat



pada grafik I.3

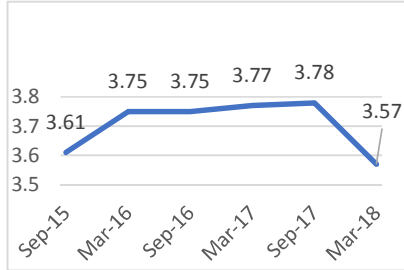
Laju inflasi tertinggi pada triwulan III 2018 terjadi di bulan Juli yang tercatat sebesar 0,26%. Tiga kelompok pengeluaran terbesar yang mengalami inflasi di bulan tersebut adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,63% yang disebabkan dimulainya pembayaran biaya pendidikan pada tahun ajaran baru, kemudian disusul kelompok bahan makanan 1,19% dan kelompok sandang 0,69%.

## C. Indikator Kesejahteraan

### 1. Kemiskinan dan Ketimpangan

Penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 mencapai 3,57 % atau mencakup sebanyak 373,12 ribu orang, walaupun mengalami penurunan namun angka ini masih di atas proyeksi

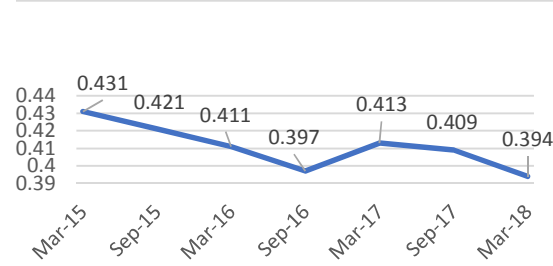
**Grafik I.4**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta**



Sumber : Website BPS DKI Jakarta

*Gini Ratio* DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebesar 0,394. Angka ini paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Pada Maret 2018, persentase pendapatan pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,16% yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah.

**Grafik I.5**  
**Perkembangan *Gini Ratio* di DKI Jakarta**



Sumber : Website BPS DKI Jakarta

## 2. Ketenagakerjaan

Lapangan kerja di Jakarta semakin banyak menyerap tenaga kerja, hal ini dapat dilihat pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta bulan Agustus 2018 sebesar 6,24%, menurun 0,90 poin dibandingkan bulan Agustus 2017 yang sebesar 7,14%.

TPT tertinggi berada di wilayah Jakarta Utara yaitu 7,01%, posisi berikutnya Jakarta Timur 6,67%, Jakarta Pusat 6,64%, Jakarta Selatan 6,31%, Kepulauan Seribu 5,33% dan Jakarta Barat 5,00%. Tingginya TPT di Jakarta Utara disebabkan banyaknya pencari kerja yang tinggal disana.

Berdasarkan tingkat pendidikan pada bulan Agustus 2018, TPT untuk penduduk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 17.74%, karena lulusan SMK dan SMA cenderung menunggu kesempatan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Sedangkan penduduk berpendidikan rendah cenderung masih mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini terlihat pada angka TPT untuk lulusan SD ke bawah yaitu 2,75%, terendah di antara semua tingkat pendidikan.

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan APBN secara nasional. Hal ini mengingat sebagian besar dana APBN baik pendapatan maupun belanja negara dikelola oleh Kementerian dan Lembaga yang berlokasi di Jakarta. Postur APBN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI Jakarta**  
**s.d. akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>950.674,6</b>	<b>653.503,1</b>	<b>1.014.539,9</b>	<b>780.130,5</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	950.674,6	653.503,1	1.014.539,9	780.130,5
1. Penerimaan Pajak	856.703,7	529.411,2	931.787,2	638.412,2
2. PNPB	93.970,9	124.091,9	82.752,7	141.718,3
II. HIBAH				
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>732.228,5</b>	<b>427.088,1</b>	<b>778.862,2</b>	<b>545.709,2</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	<b>748.529,2</b>	<b>412.615,6</b>	<b>757.460,4</b>	<b>532.886,1</b>
1. Belanja Pegawai	190.336,7	139.759,7	224.921,5	186.996,1
2. Belanja Barang	184.693,9	91.255,5	194.991,9	108.491,3
3. Belanja Modal	131.941,0	43.261,3	81.603,2	45.052,3
4. Belanja Subsidi	178.816,7	92.366,0	181.444,9	123.407,2
5. Belanja Hibah	-	-	-	-
6. Belanja Bantuan Sosial	54.099,1	41.990,1	79.540,3	62.462,3
7. Belanja Lain-lain	8.641,8	3.983,0	7.440,3	6.476,8
8. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	<b>35.551,4</b>	<b>14.472,5</b>	<b>21.401,8</b>	<b>12.823,1</b>
1. Transfer ke Daerah	35.551,4	14.472,5	21.401,8	12.823,1
a. Dana Perimbangan	35.551,4	14.472,5	21.401,8	12.823,1
1) Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
2) Dana Bagi Hasil	32.402,5	12.432,7	18.265,2	10.790,4
3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.148,9	2.039,8	3.136,6	2.032,7
b. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
c. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
d. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
2. Dana Desa	-	-	-	-
<b>C. SURPLUS DEFISIT</b>	<b>218.446,1</b>		<b>283.951,2</b>	

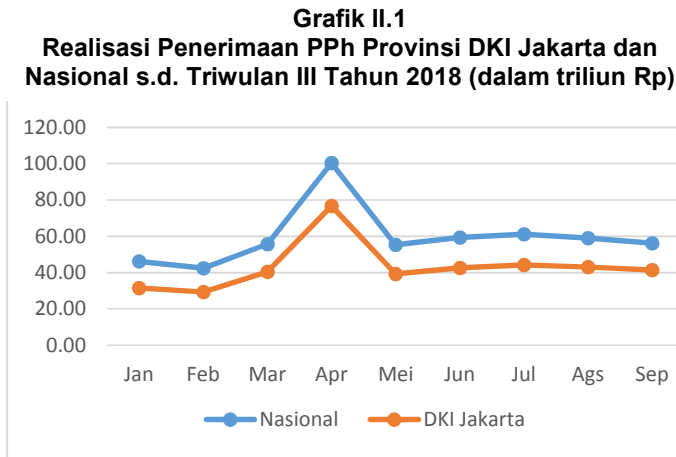
Sumber: GFS Triwulan III 2018, OM SPAN, E-Rekon kemenkeu, Simtrada (data diolah).

Realisasi penerimaan Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan III tahun 2018 mencapai 76,89 persen dari target, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan III 2017 sebesar 68,74 persen. Adapun realisasi belanja Pemerintah Pusat pada triwulan III tahun 2018 mencapai 70,35 persen dari anggaran, lebih tinggi dibanding realisasi belanja pada triwulan III tahun 2017 sebesar 55,12 persen dari anggaran. Realisasi transfer ke daerah pada triwulan III 2018 mencapai 59,92 persen dari pagu, meningkat dibandingkan realisasi triwulan III 2017 sebesar 40,71 persen dari pagu.

## A. Pendapatan Negara

### 1. Penerimaan Perpajakan

#### a) Pajak Penghasilan (PPh)

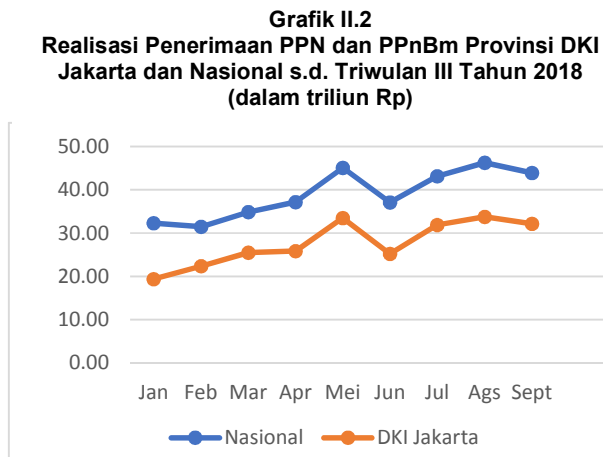


Sumber: Laporan GFS Triwulan III 2018, OM SPAN (data diolah)

PPh Pasal 25 Badan sebesar Rp.139,33 triliun atau 36,06 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian PPh sampai dengan triwulan III tahun 2018 diantaranya meningkatnya harga minyak dunia, kelanjutan perbaikan basis data wajib pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai dampak program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sampai dengan triwulan III tahun 2018 mencapai Rp 386.42 triliun, atau 72,15 persen dari penerimaan PPh secara nasional. Realisasi penerimaan PPh pada triwulan III Tahun 2018 tercatat sebesar Rp 128,61 triliun, terbesar berasal dari

#### b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah



Impor sebesar 55,97 persen. Adapun impor barang dipengaruhi oleh dilaksanakannya proyek infrastruktur dan sektor manufaktur yang cukup besar.

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBm pada sampai dengan triwulan III Tahun 2018 mencapai Rp.228,76 trilyun atau setara dengan 65,08 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBm secara nasional. Untuk realisasi penerimaan PPN dan PPnBm pada triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp 97,77 triliun dengan kontribusi terbesar dari PPN

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)



**Grafik II.3**  
**Realisasi Penerimaan Cukai Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan III Tahun 2018 (dalam triliun Rp)**

dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 0,197 trilyun atau setara dengan 0,02% dari

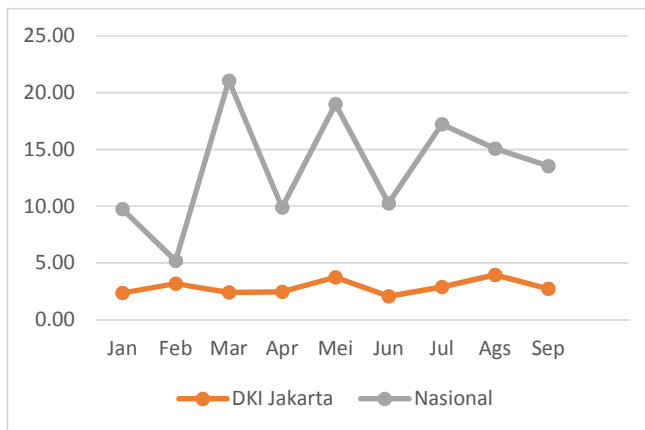


Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

tersebut dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok, optimalisasi penerimaan cukai serta peredaran rokok ilegal.

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

**Grafik II.4**  
**Realisasi PNBPN Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan III Tahun 2018 (dalam triliun Rp)**



Sumber: Laporan GFS Triwulan III 2018, OM SPAN (data diolah)

### b) Penerimaan Bagian Laba BUMN

### c) Penerimaan Cukai

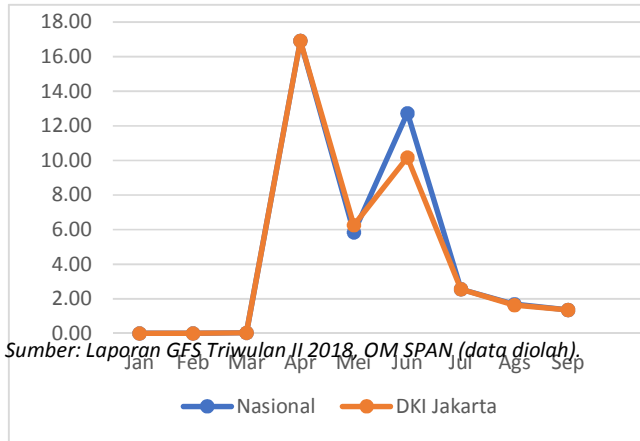
Realisasi penerimaan Cukai sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 0,197 trilyun atau setara dengan 0,02% dari penerimaan cukai secara nasional sebesar Rp 90,01 triliun. Sedangkan penerimaan cukai pada triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp 0,124 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari kebijakan pemberantasan cukai ilegal serta peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) melalui PMK-146/PMK.010/ 2017 di tahun 2018. Kebijakan peningkatan tarif cukai

tersebut dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok, optimalisasi penerimaan cukai

### a) Penerimaan Pendapatan Sumber Daya Alam

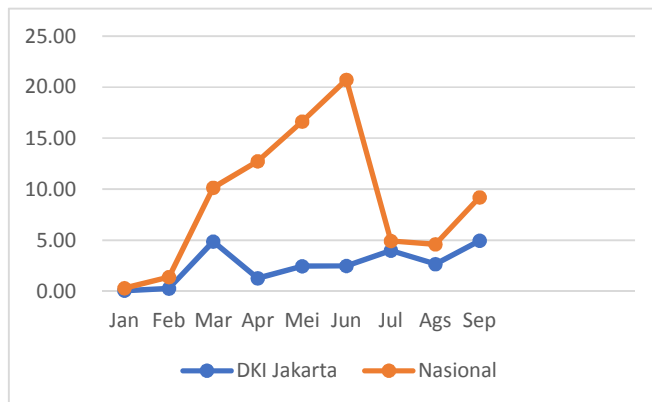
Realisasi penerimaan sumber daya alam sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 25,69 triliun atau 21,46 persen dari total penerimaan sumber daya alam secara nasional sebesar RP.120,96 triliun, untuk realisasi penerimaan sumber daya alam pada triwulan III tahun 2018 sendiri sebesar Rp 9,53 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari iuran produksi batubara sebesar 56,66 persen.

**Grafik II.5**  
**Realisasi Penerimaan Bagian Laba BUMN Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan III Tahun 2018**  
 ( dalam triliun Rp)



Sumber: Laporan GFS Triwulan III 2018, OM SPAN (data diolah)

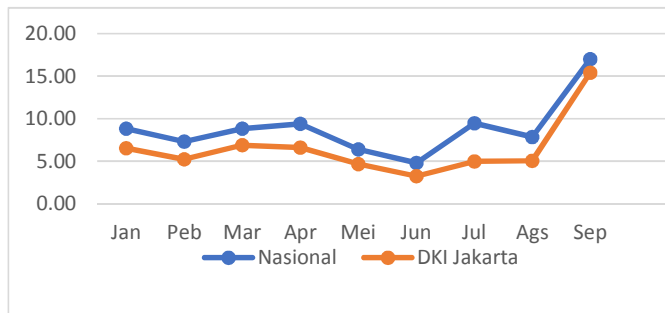
**Grafik II.6**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan BLU Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan III Tahun 2018**  
 ( dalam triliun Rp)



Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

d) Penerimaan PNBP Lainnya

**Grafik II.7**  
**Realisasi PNBP Lainnya Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan III Tahun 2018**  
 ( dalam triliun Rp)



Realisasi penerimaan laba BUMN sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp38,98 triliun atau 95,03 persen dari penerimaan nasional sebesar Rp 41,12 triliun, dimana realisasi untuk triwulan III tahun 2018 sendiri sebesar Rp 5,54 triliun. Sumbangan terbesar berasal dari penerimaan BUMN non-perbankan sebesar 57,09 persen, yaitu pembagian deviden hak Pemerintah pada BUMN.

c) Penerimaan pendapatan BLU

Realisasi penerimaan BLU sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 23,17 triliun atau sebesar 58,66 persen dari penerimaan BLU secara nasional sebesar Rp.39,50 triliun, dimana pendapatan BLU pada triwulan III tahun 2018 sendiri sebesar Rp 11,65 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pendapatan jasa layanan rumah sakit.

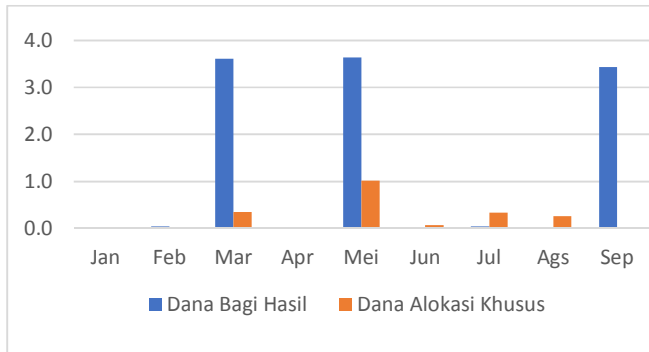
Realisasi penerimaan PNBP Lainnya sampai dengan triwulan III tahun 2018 tercatat Rp.53,88 triliun atau setara dengan 68,00 persen dari penerimaan PNBP Lainnya secara nasional, dengan penerimaan pada triwulan III tahun 2018 sendiri sebesar Rp 25,43. Pertumbuhan realisasi

tersebut khususnya berasal dari pembayaran biaya hak penggunaan izin stasiun radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta adanya peningkatan volume layanan atas jasa pada Kementerian Negara/Lembaga antara lain jasa kepolisian (penerbitan BPKB dan STNK), jasa kepelabuhanan dan jasa pertanahan (*access reform*).

### 3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan triwulan III Tahun 2018 tidak terdapat penerimaan hibah pada lingkup

**Grafik II.10**  
**Realisasi Dana Transfer ke Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam triliun Rp)**



Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

## B. Belanja Negara

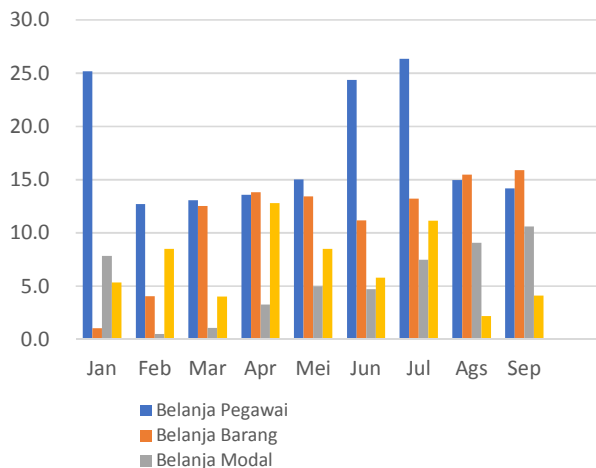
### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Total realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 532,89 triliun, atau mencapai angka 69,21 persen dari

anggaran. Realisasi tersebut setara dengan 71,92 persen dari total realisasi belanja secara nasional sebesar 740,90 triliun. Tingginya realisasi belanja pegawai tersebut disebabkan adanya pembayaran tunjangan pegawai dan gaji ke-13.

### 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi dana transfer ke daerah sampai dengan triwulan III tahun 2018 mencapai Rp



12.823,11 miliar atau 59,92 persen dari anggaran. Alokasi transfer ke daerah tersebut relatif kecil, yaitu hanya sebesar 2,79 persen dari total dana transfer. Hal ini mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi sehingga dapat mengandalkan Penerimaan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan Pemerintah

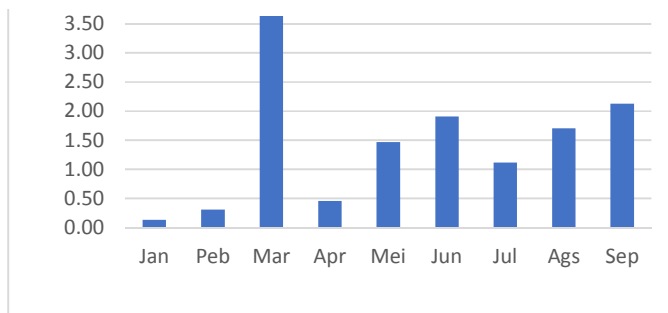
Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah).

Daerah.

### 3. Pengelolaan BLU

**Grafik II.9**  
**Realisasi Belanja Satuan Kerja Pengguna BLU Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III Tahun 2018 (dalam triliun Rp)**

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)



Dari jumlah satuan kerja pengelola BLU lingkup Provinsi DKI Jakarta sebanyak 43 satuan kerja, tercatat realisasi belanja BLU sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 12.86 trilyun atau 50,24 persen dari anggaran.

### 4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan triwulan III Tahun 2018, investasi Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 pinjaman terdiri dari 3 pinjaman untuk Pemprov DKI Jakarta, 1 pinjaman untuk PDAM DKI Jakarta, dan 1 pinjaman untuk KPI.

**Tabel II.2**  
**Outstanding Pinjaman Pemda/PDAM Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III Tahun 2018**

	Nomor Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Loan Id	Jumlah Hak Tagih (miliar)	Debitur	Status
1.	SLA-876/DP3/1996	14-02-1996	2117201		Pemprov DKI	Sudah Lunas
2.	AMA-363/SLA-607/DSMI	19-02-2010	2077401		PDAM DKI	Sudah Lunas
3.	SLA-1247/DSMI/2012	16-05-2012	2219001	471,32	Pemprov DKI	Belum jatuh tempo
4.	SLA-1263/DSMI/2016	04-02-2016	2241001	9,6 JPY	Pemprov DKI	Belum jatuh tempo
5.	RDI-259/DP3/1993	30-01-1993	2001601	24,60	KPI	Belum jatuh tempo (pailit)
Jumlah Hak Tagih						

Sumber : BAR Outstanding Pinjaman Semester II 2018

Investasi pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN. Sampai dengan triwulan III tahun 2018, terdapat 27 BUMN lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan plafon pinjaman yang variatif.

**Tabel II.3**  
**Outstanding Pinjaman BUMN Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III Tahun 2018**

URR	PLAFON	TUNGGAKAN POKOK	TUNGGAKAN NON POKOK	HTP - ORI
AUD	25,965,824.02	0.00	0.00	5,770,183.10
DEM	40,527,190.75	0.00	0.00	5,073,184.00
EUR	250,527,068.24	841,563.32	2,905,950.89	30,810,016.94

IDR	15,243,326,452,179.30	1,183,528,065,853.92	3,830,911,056,283.71	7,700,359,808,355.75
JPY	675,099,454,114.00	0.00	12,501.00	227,258,029,786.88
USD	3,915,178,562.20	269,116,059.35	200,525,445.31	1,982,216,018.20

Sumber : KPPN Investasi

Investasi Pemerintah Pusat lainnya diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat kerja sama dengan pihak perbankan dan pemberian Kredit Ultra Mikro dari Pemerintah. Sampai dengan triwulan III tahun 2018, jumlah debitur penerima kredit dan realisasi penyaluran kredit tercatat sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Jumlah Debitur dan Realisasi Penyaluran KUR dan UMi Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III Tahun 2018**

Jenis Pinjaman	Jumlah Debitur	Realisasi (Rupiah)	Keterangan
KUR	62.358	2.113.686.857.816	Data Realisasi Akad (SIKP)
Umi	12.124	36.144.222.000	Data dari Dit.SMI

Sumber : SIKP

### C. Prognosis Realisasi APBN

Berdasarkan tren realisasi pendapatan APBN dalam triwulan I s.d. III tahun 2018, realisasi triwulan IV tahun 2017, maka realisasi pendapatan pada triwulan IV tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.020.627,1 milyar. Penerimaan sektor perpajakan masih akan tetap menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan penerimaan. Adapun, berdasarkan tren realisasi belanja triwulan I s.d. III tahun 2018 dan juga capaian realisasi pada triwulan IV tahun 2017, maka realisasi belanja sampai dengan triwulan IV tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 709.231,9 milyar. Kenaikan yang cukup tinggi diperkirakan terjadi pada belanja barang dan belanja modal mengingat intensitas penyelesaian pengadaan barang dan jasa serta kegiatan kantor akan semakin meningkat pada triwulan terakhir tahun anggaran.

**Tabel II.5**  
**Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI JAKARTA s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III Tahun 2018		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi thd Pagu
Pendapatan Negara	1.014.539,9	780.130,5	76,89	1.020.627,1	100,60
Belanja Negara	778.862,2	545.709,2	70,35	709.231,9	91,06
Surplus/Defisit	235.677,7	234.421,3		311.395,2	

Sumber OMSPAN, <http://e-rekon-ik.djbn.kemenkeu.go.id/>, Laporan GFS Triwulan III 2018

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dipengaruhi oleh besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola pemerintah Provinsi DKI Jakarta. APBD merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah. Semua diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta**  
**s.d. Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
PAD	<b>41.488,19</b>	<b>31.309,94</b>	<b>44.570,51</b>	<b>32.038,93</b>
Pajak Daerah	35.230,00	26.949,58	38.125,00	28.236,31
Retribusi Daerah	677,88	469,77	689,90	450,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	453,33	448,67	539,93	407,39
Lain-Lain PAD yang Sah	5.126,96	3.441,93	5.215,68	2.945,12
Pendapatan Transfer	<b>18.770,21</b>	<b>14.459,86</b>	<b>21.401,86</b>	<b>12.823,11</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	15.485,63	12.307,70	18.265,23	10.678,57
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	135,60	112,37	-	111,83
Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus	3.148,97	2.039,79	3.136,63	2.032,71
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<b>2.207,72</b>	<b>714,19</b>	<b>57,61</b>	<b>9,18</b>
Pendapatan Hibah	2.207,72	714,19	57,61	9,18
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>62.466,13</b>	<b>46.483,99</b>	<b>66.029,98</b>	<b>44.871,25</b>
<b>BELANJA</b>	<b>61.821,92</b>	<b>28.612,95</b>	<b>71.441,43</b>	<b>34.672,25</b>
Belanja Pegawai	23.207,50	14.372,27	23.272,19	16.317,30
Belanja Barang	16.608,66	7.709,43	20.035,71	10.126,41
Belanja Bunga	49,22	31,90	50,52	38,88
Belanja Subsidi	3.234,11	112,74	4.210,50	1.037,33
Belanja Hibah	1.458,03	739,34	1.802,08	1.070,55
Belanja Bantuan Sosial	2.499,34	1.911,81	4.183,31	1.923,14
Belanja Bantuan Keuangan	348,80	0	271,78	194,96
Belanja Modal	15.881,10	3.720,42	16.995,20	3.962,29
Belanja Tidak Terduga	325,48	15,04	348,36	1,40
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>	-	-	<b>271,78</b>	<b>194,96</b>
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan				

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	271,78	194,96
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>70.191,95</b>	<b>28.612,96</b>	<b>71.441,43</b>	<b>34.672,25</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>17.871,03</b>		<b>10.198,99</b>

Sumber: Laporan LKPK (GFS) Triwulan III Tahun 2018 dan BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 mempunyai anggaran pendapatan sebesar Rp66.029,98 miliar, meningkat 5,62% dari tahun sebelumnya dan anggaran belanja sebesar Rp71.441,43 miliar meningkat 15,12% dari tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan III 2018 realisasi pendapatan APBD DKI Jakarta sebesar Rp44.871,25 miliar atau mencapai 67,96% dari anggaran, lebih rendah dari triwulan III 2017 yang mencapai sebesar 73,36%. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah terkontraksi sebesar 3,47% (yoy), disebabkan lebih rendahnya realisasi Lain-Lain PAD yang sah yang turun sebesar 14,41%.

Untuk dana transfer sampai dengan triwulan III 2018 realisasi mencapai 59,92% dari anggaran, disusul realisasi pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai 15,94% dari anggaran. Penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagian besar ditopang dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 72,12%.

Dari sisi belanja, realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai 48,53% dari anggaran. Realisasi belanja terbesar berasal dari Belanja Pegawai yang menyumbang 48,72% dari total belanja. Tingginya realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan III 2018 disebabkan adanya pembayaran gaji ke 13 pada bulan Juli 2018.

## A. Pendapatan Daerah

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

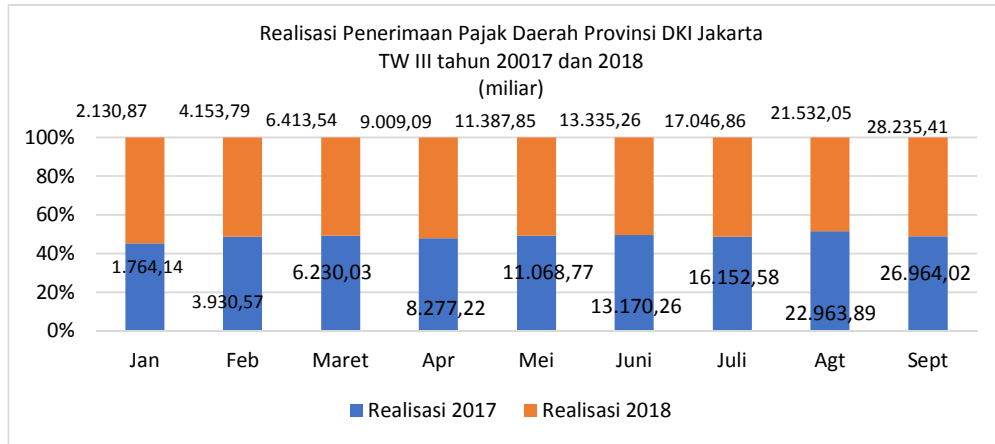
Pajak Daerah menyumbang 88,39% dari PAD atau sebesar Rp.28.236,31, disusul Lain-lain PAD yang sah yang menyumbang 9,12% dari PAD.

Penyumbang Penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### a. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya Optimalisasi data potensi pajak daerah pada tahun 2018 dilaksanakan Fiscal Cadaster, yaitu pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka pemungutan pajak tanah sehingga didapatkan data potensi pajaknya.

Grafik 3.1



Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) TW III tahun 2017 dan 2018

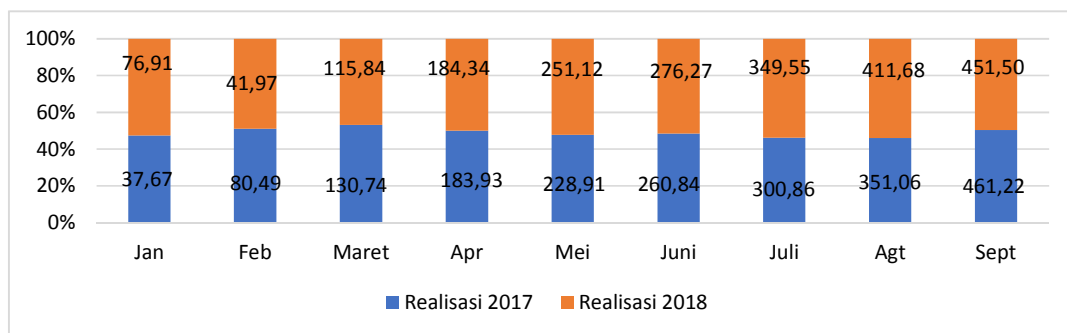
Realisasi penerimaan pajak daerah hingga triwulan III 2018 mencapai 74,06% dari target. Penyumbang terbesar dari realisasi pajak daerah yaitu PBB-P2 yang mencapai 28,41% disusul Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 21,55% dari total realisasi pajak daerah.

Kepala BPRD Faisal Syafrudin menjelaskan dalam APBD-Perubahan (APBB-P) 2018 akan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan lima metode. Pertama, optimalisasi penerimaan pajak melalui penguatan pendataan. Kedua, memperkuat penegakan hukum kepada wajib pajak. Ketiga, integrasi izinusaha dalam bentuk tax clearance. Ketiga, keterkaitan secara menyeluruh kepada wajib pajak melalui program Jakarta Satu. Keempat, peningkatan pelayanan dan pemeriksaan berbasis teknologi. &quot;Terakhir, sosialisasi atas pelayanan peraturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang inovatif, ujamya. ([www.jakarta.bisnis.com/read/](http://www.jakarta.bisnis.com/read/))

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Pada APBD tahun 2018, retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp689,90 miliar dan hingga akhir triwulan III 2018 terealisasi sebesar 65,44%. Beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, peningkatan *Low Enforcement*, dan Intensifikasi penerimaan retribusi daerah.

Grafik 3.2  
Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Provinsi DKI Jakarta Triwulan III Tahun 2017 dan 2018 (miliar)



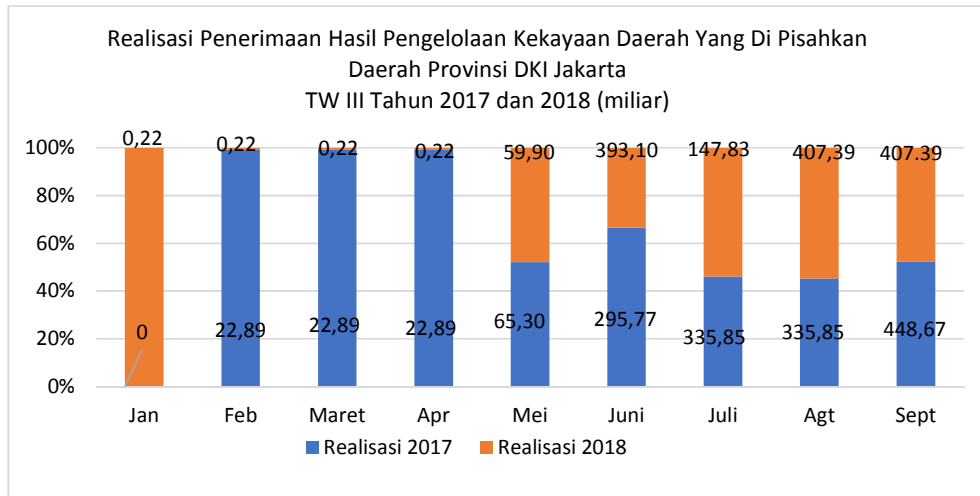
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan



Pada APBD tahun 2018, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp539,93 miliar dan hingga akhir triwulan III 2018 realisasi mencapai 75,45%.

Grafik 3.3

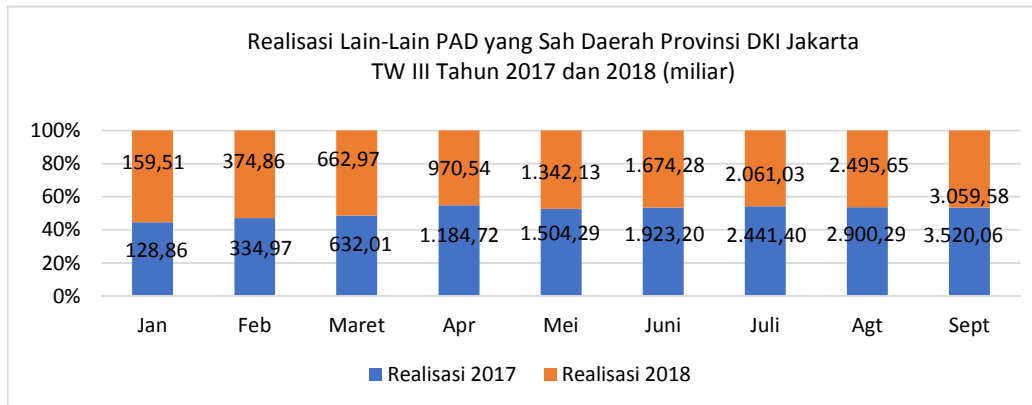


Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah hingga akhir triwulan III 2018 mencapai 58,66% dari anggaran, namun mengalami kontraksi 16,33% dari triwulan yang sama tahun 2017 disebabkan menurunnya pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor karena adanya pemutihan.

Grafik 3.4



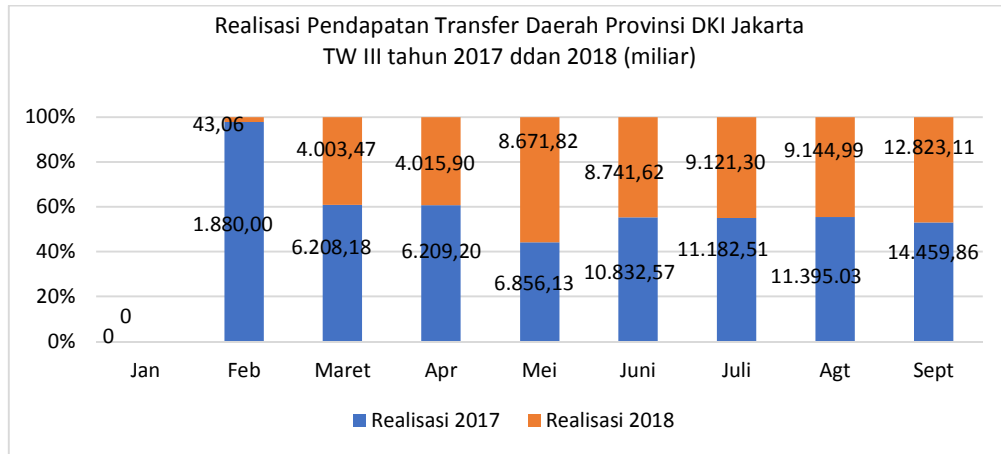
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

2. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan

Pada APBD tahun 2018, dana transfer dialokasikan sebesar Rp21.401,86 miliar dan hingga akhir triwulan III realisasi mencapai 59,92% dari anggaran. Pendapatan transfer didominasi oleh dana Bagi Hasil Pajak mencapai 85% dari total dana transfer. Sementara dana alokasi khusus hanya sebesar 15% dari total dana transfer atau sebesar Rp3,1 triliun. Pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dengan

pemerintah pusat bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Pajak dan KPP Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan/transfer melalui perubahan peraturan penetapan pajak pusat dan daerah.

Grafik 3.5



Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

Untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjalin kerja sama dengan Bank Bukopin. meluncurkan pembayaran PBB-P2 melalui gerai Alfamart diacaranya di Apartemen Bassura City-Pasar Gembong Jatinegara Jakarta Timur. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Faisal Syafruddin mengatakan melalui penambahan outlet pembayaran pajak untuk PBB-P2, membuat pihaknya semakin optimistis dapat mencapai target realisasi pencapaian pajak di sektor PBB-P2.

"Dengan adanya kerja sama ini, maka semakin bertambah tempat pembayaran pajak. Jadi kami semakin yakin dapat mencapai target pajak PBB. Karena itu, kami akan membuka sebanyak mungkin channel pembayaran pajak. Sehingga masyarakat semakin mudah membayar pajak," kata Faisal, di Jakarta, Rabu (12/9). ([www.bprd.jakarta.go.id/2018](http://www.bprd.jakarta.go.id/2018))

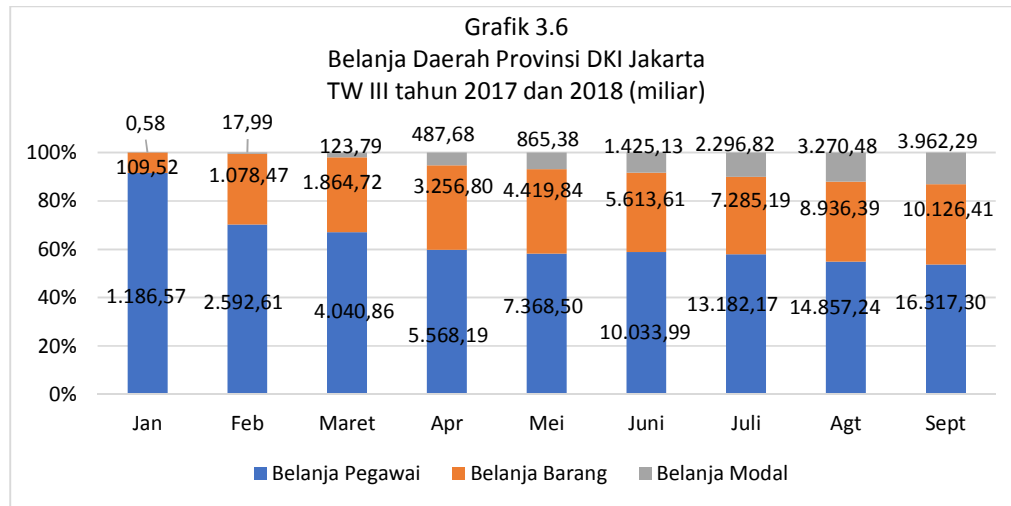
### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah hingga akhir triwulan III 2018 mencapai Rp9,18 miliar atau sebesar 15,94% dari target. Terjadi pertumbuhan pendapatan hibah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,15%.

## B. Belanja Daerah

### 1. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

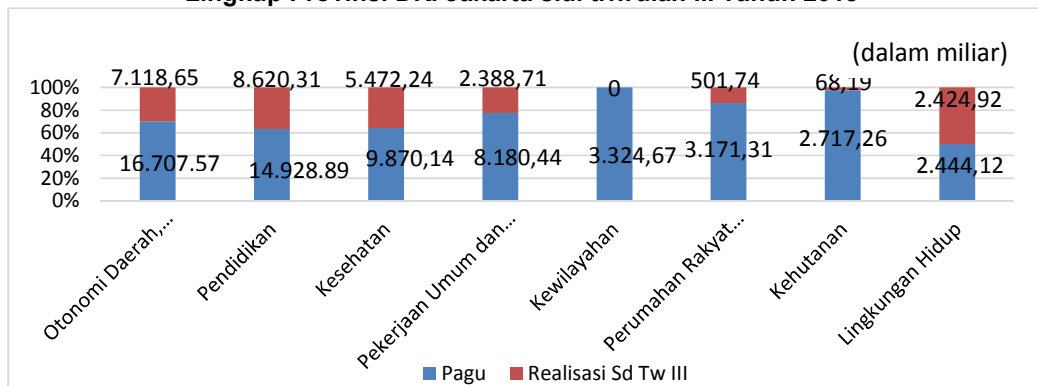
Realisasi belanja pemda sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp34.477,29 miliar atau mencapai 48,63% dari anggaran. Penyumbang terbesar berasal dari belanja pegawai yang hingga akhir triwulan III 2018 terealisasi mencapai 70,11% dari anggaran, disusul Belanja barang dan jasa sebesar 50,54%, sementara belanja modal 21,72% karena terkendala proses lelang serta proses pembangunan gedung baru yang harus menghapuskan gedung lama dan di-*reappraisal* kembali oleh DJKN.



Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

## 2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

**Grafik 3.7**  
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Delapan Urusan Tertinggi)  
Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. triwulan III Tahun 2018



Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan sebanyak 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang dituangkan dalam APBD. Untuk ketujuh urusan pilihan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp61.334,39 miliar pada tahun 2018 (86,19% dari total belanja). Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan untuk program-program fisik antara lain penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana umum (sekolah, perumahan, air bersih, ruang terbuka hijau, dsb) guna pencapaian MDG's (*Millennium Development Goals*) yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan untuk urusan pilihan dengan alokasi terbesar adalah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggaran dari APBD tahun 2018 sebesar Rp1.162 miliar dan urusan Kehutanan dengan anggaran Rp2.717,26 miliar.

### C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

**Tabel 3.2**  
**Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi DKI Jakarta**  
**s.d. Triwulan IV tahun 2018 (dalam miliar rupiah)**

Uraian	Anggaran	Realisasi s.d. TW III		Perkiraan s.d. TW IV	
		Rp	% Realisasi thd Anggaran	Rp	% Realisasi thd Anggaran
Pendapatan Daerah	66.029,98	44.871,25	68,13	64.529,45	97,73
Belanja Daerah	71.441,43	34.672,25	48,72	58.637,26	82,39
Surplus/Defisit		10.313,92		5.892,19	

Sumber : Laporan LKPK (GFS) Triwulan III Tahun 2018 dan BPKD Pemprov DKI Jakarta (data diolah)

Hingga akhir triwulan IV tahun 2018, diperkirakan perekonomian Pemda Provinsi DKI Jakarta akan meningkat. Berdasarkan realisasi pendapatan APBD Provinsi DKI Jakarta semester I 2018, diperkirakan realisasi pendapatan semester II mencapai 97,73% dari anggaran atau sebesar Rp64.529,45 miliar. Selain itu berdasarkan faktor-faktor dan tren realisasi tahun sebelumnya, diperkirakan realisasi belanja pada triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp58.637,26 miliar.

## IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

### A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Pada Triwulan III tahun 2018 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Pusat dan Daerah Tingkat Regional DKI Jakarta dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)**

Uraian	Triwulan III tahun 2018					Triwulan III tahun 2017
	Pusat	Daerah	Eliminasi	Konsolidasi	Kenaikan/ Penurunan	Konsolidasi
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>780.130,5</b>	<b>44.871,3</b>	<b>(12.823,1)</b>	<b>812.178,7</b>	<b>8,92 %</b>	<b>745.688,8</b>
Pendapatan Perpajakan	638.412,2	28.236,3	0	666.648,5	20 %	555.486,7
Pendapatan Bukan Pajak	141.718,3	3.802,6	0	145.520,1	-23.2 %	189.488,1
Hibah	0	9,1	0	9,1	98,7 %	714
Transfer	0	<b>12.823,1*</b>	<b>(12.823,1)*</b>	0	0	0
<b>Belanja Negara</b>	<b>545.709,2</b>	<b>34.672,3</b>	<b>(12.823,1)*</b>	<b>567.558,4</b>	<b>12.61 %</b>	<b>610.851,13</b>
Belanja Pemerintah	532.886,1	34.672,3	0	567.558,4	-7,09%	610.851,13
Transfer	<b>12.823,1*</b>	0	<b>(12.823,1)*</b>	0	0	0
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>234.421,3</b>	<b>10.198,9</b>	<b>(12.823,1)</b>	<b>218.974,1</b>	<b>59.4 %</b>	<b>137.331,4</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>13.075,6</b>	<b>0</b>	<b>13.075,6</b>	<b>143.8 %</b>	<b>5.363,1</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	15.174,9	0	15.174,9	96.9 %	7.706,3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.099,3	0	2.099,3	-10.4 %	2.343,2
<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>234.421,3</b>	<b>23.274,6</b>	<b>0</b>	<b>92.976</b>	<b>-34.8 %</b>	<b>142.694,4</b>

Sumber : LKPK (GFS) Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2018 dan Triwulan III 2017

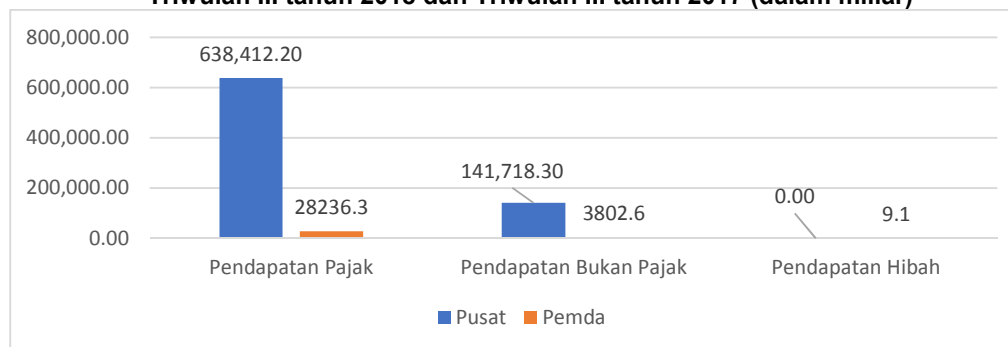
Ket \* :Seluruh pengeluaran Dana Transfer ke Daerah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pemerintah pusat yang dieliminasi dengan penerimaan transfer pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian Triwulan III tahun 2018 sebesar Rp812.178,7 miliar, meningkat 8,92% dari triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja negara meningkat 12,61% dari triwulan III tahun 2017.

### B. Pendapatan Konsolidasian

#### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

**Grafik 4.1**  
**Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III tahun 2018 dan Triwulan III tahun 2017 (dalam miliar)**



Sumber: LKPK (GFS) Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2018 (diolah)

Dilihat dari proporsinya, pajak pemerintah pusat tercatat sebesar 95,76% dan pajak daerah sebesar 4,2% dari Pendapatan Pajak Konsolidasian. Sementara PNBPN pemerintah pusat tercatat sebesar 97,38% dan PNBPN daerah sebesar 2,61% dari PNBPN Konsolidasian. Untuk Pendapatan Hibah Konsolidasian seluruhnya merupakan pendapatan hibah yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Dalam LKPK (GFS) Triwulan III Tahun 2018 tidak memperhitungkan pendapatan hibah pemerintah pusat.

## 2. Analisis Perubahan

**Grafik 4.2**  
**Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III tahun 2018 dan Triwulan III tahun 2017 (dalam miliar)**



Sumber: LKPK (GFS) Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2018 dan Triwulan III 2017 dan E Account APBN s.d 30 September 2018 (diolah)

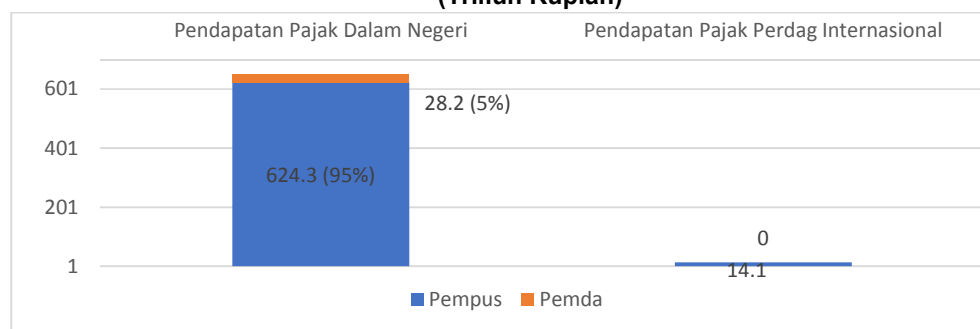
Pendapatan pajak konsolidasian meningkat sebesar 20% dibandingkan triwulan III tahun 2017 dan berkontribusi 82,08 % terhadap total pendapatan konsolidasian. Jika dibandingkan dengan pajak nasional, pendapatan pajak konsolidasian mencapai 70,9 % dari jumlah pendapatan pajak nasional. Kenaikan pajak konsolidasian ditopang jenis penerimaan pajak pemerintah pusat seperti PPh Non Migas dan PPN dalam negeri. Terutama dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan kinerja sektor usaha industri, perdagangan, pertambangan, dan pertanian serta

meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak OP. Kontribusi dari pajak daerah sebesar 4,2% terutama berasal dari pajak kendaraan bermotor. Jumlah ini lebih tinggi 4,8 % jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2017.

Jumlah Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian terkontraksi minus 23,2% dibandingkan triwulan III Tahun 2017 dan berkontribusi sebesar 17,92% terhadap pendapatan konsolidasian. PNPB Provinsi DKI Jakarta berkontribusi 51,7 % terhadap PNPB nasional.

Sementara Pendapatan Hibah Konsolidasian yang merupakan pendapatan hibah Pemprov DKI Jakarta terkontraksi sebesar 98,7 % dari triwulan III Tahun 2017 disebabkan pada 2017 terdapat hibah pengadaan MRT dari pemerintah pusat.

**Grafik 4.3**  
**Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan III tahun 2018 (Triliun Rupiah)**



Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2018 (diolah)

Pendapatan pajak konsolidasian terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri yang merupakan kontribusi pajak pemerintah pusat sebesar 95% dan pajak daerah sebesar 5%. Sementara pajak perdagangan internasional hanya merupakan kontribusi pajak pemerintah pusat.

**Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian**

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi DKI Jakarta Triwulan III tahun 2017 dan 2018 (dalam triliun Rupiah)**

Uraian	Triwulan III tahun 2017		Triwulan III tahun 2018	
	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
Penerimaan Perpajakan	555,48	-21,87 %	666.65	20 %
PNBP	189,49	19,21 %	145.52	-23,2 %
Total	744,97	14,36%	812.17	18.75%
PDRB/Pert. Ekonomi	618,24	6,29 %	679,71	9,94%

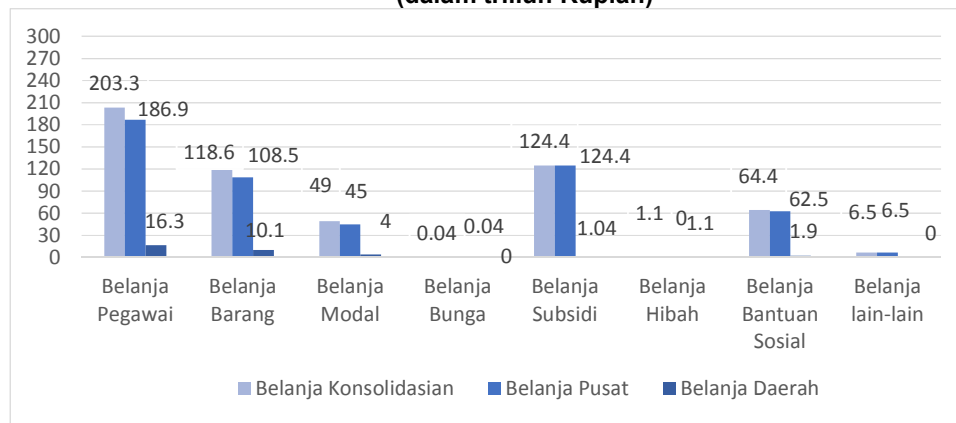
Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 (diolah) dan Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 (diolah)

Pada Triwulan III tahun 2018 PDRB Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp679,71 Triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,41%. Realisasi pendapatan konsolidasian meningkat 18.75% dibanding Triwulan III tahun 2017. Pada periode triwulan III 2018, selisih pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan PDRB terealisasi sebesar Rp132,46 Triliun. Selisih positif angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut menunjukkan potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi telah dioptimalkan secara baik khususnya oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan PDRB sebesar 9,94%.

### C. Belanja Konsolidasian

#### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

**Grafik 4.4**  
Perbandingan Belanja dan Transfer pada Provinsi DKI Jakarta Triwulan III Tahun 2018 (dalam triliun Rupiah)



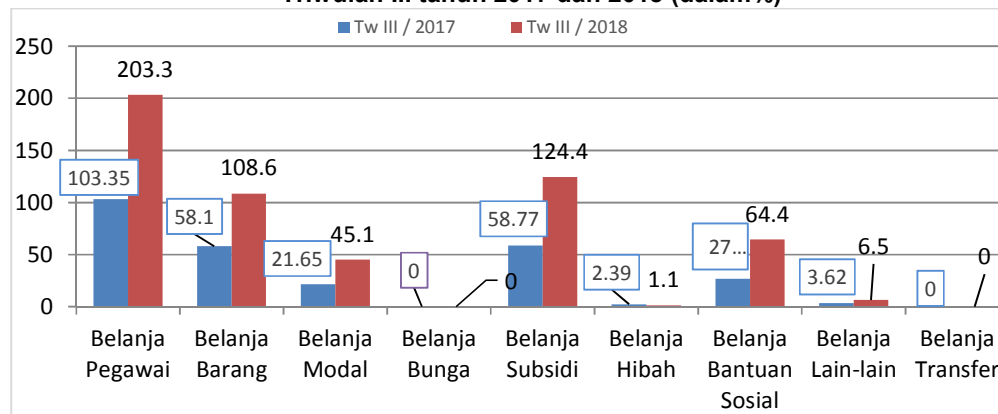
Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2018 (diolah)

Seluruh Belanja Konsolidasian didominasi oleh Belanja Pemerintah Pusat karena adanya kantor Pusat Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sementara angka realisasi Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah dan Belanja bunga merupakan realisasi APBD. Belanja Hibah dialokasikan untuk daerah penyangga yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta, di antaranya seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, transportasi, dan kemacetan.



## 2. Analisis Perubahan

**Grafik 4.5**  
**Tabel Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta**  
**Triwulan III tahun 2017 dan 2018 (dalam%)**



Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta Triwulan III Tahun 2017 dan 2018 (diolah)

Total Belanja Pemerintah konsolidasian naik sebesar 12,61 %. Hampir semua komponen Belanja mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan III Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan Belanja Pemerintah Pusat Nasional yang sebesar Rp 938,8 triliun hingga akhir September 2018, maka Belanja Pemerintah Pusat di DKI Jakarta mencapai 60,4%.

Belanja pegawai naik sebesar 97 %. Hal ini disebabkan pembayaran gaji, tunjangan dan pensiun ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibayarkan pemerintah pada bulan Juli 2018. Belanja Bantuan Sosial konsolidasian naik 138 % sebagai konsekuensi adanya komitmen pemerintah dalam program-program perlindungan sosial. Sementara Belanja subsidi konsolidasian naik sebesar 111,6 % dipengaruhi menguatnya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah.

### Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

a. Pada tahun 2018, kebijakan fiskal nasional diarahkan pada tiga strategi utama, yakni optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan. Penerapannya di tingkat pusat, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui perbaikan sistem penerimaan negara dan upaya reformasi antara lain penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5 % dan perbaikan basis data pajak sebagai kelanjutan program tax amnesty.

Sementara di tingkat provinsi, optimalisasi data potensi pajak daerah melalui *Fiscal Cadaster*, yaitu pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka pemungutan pajak tanah sehingga didapatkan data potensi pajaknya. Upaya pusat dan daerah ini mendorong peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak pada triwulan III meningkat sebesar 20%

dibandingkan Triwulan yang sama pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan aktifitas perekonomian regional yang terus meningkat, sehingga mendorong konsumsi masyarakat serta kinerja bisnis swasta di Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah di DKI Jakarta khususnya pada kegiatan produktif seperti infrastruktur dan perlindungan sosial membawa DKI Jakarta berkontribusi 17,51 % terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

- b. Dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan, target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RKPD dan KUA PPAS 2018 dapat dicapai pada Triwulan III ini dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,41%. Pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta membawa hasil signifikan terlihat dari laju inflasi setelah Lebaran terus menurun yaitu bulan Juli 0.26%, bulan Agustus 0.03% dan September deflasi -0,13 % dan IPM 80,06, sedangkan angka kemiskinan masih di angka 3,57%.
- c. Dalam hal ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta pada Bulan Agustus 2018 meningkat menjadi 63,95% dibandingkan tahun 2017 yang 61,97 %. Sementara tingkat pengangguran turun 0,9 poin dari angka 7,14 di tahun 2017 menjadi 6,24 di tahun 2018. Hal ini menunjukkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai hasil investasi maupun upaya pemerintah pusat dan daerah menciptakan lapangan kerja melalui Kredit Usaha Rakyat, Ultra Mikro (UMi), dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Oke Oce).

#### D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

**Tabel 4.3**  
**Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi DKI JAKARTA Triwulan III**  
**tahun 2018 (dalam triliun Rupiah)**

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
<b>Pendapatan:</b>	<b>1.357.999.734.587.690</b>
a. Pajak	665.746.530.279.645
b. Kontribusi sosial	0
c. Hibah	111.840.715.238
d. Pendapatan lain	692.141.363.592.804
<b>Beban:</b>	<b>518.655.552.255.314</b>
a. Kompensasi pegawai	205.372.535.842.794
b. Penggunaan barang dan jasa	99.869.887.498.922
c. Konsumsi aset tetap	0
d. Bunga	38.876.388.693
e. Subsidi	124.444.566.780.826
f. Hibah	764.999.046.010
g. Manfaat sosial	64.385.469.746.210
h. Beban Lainnya	23.779.226.951.850
<b>Keseimbangan operasi bruto/neto</b>	<b>839.344.182.332.373</b>
<b>Transaksi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>49.014.634.085.963</b>
a. Aset tetap	47.210.059.754.874
b. Persediaan	0
c. Barang berharga	0
d. Aset nonproduksi	1.804.574.331.089
<b>Net Lending/Borrowing</b>	<b>790.329.548.246.410</b>
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	792.304.819.875.189

- Domestik	792.304.819.875.189
- Luar Negeri	0
b. Keterjadian Kewajiban	1.975.271.628.779
- Domestik	1.975.271.628.779
- Luar Negeri	0

Sumber: Laporan Operasional LSKP Triwulan III tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta

### 1. Nilai Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Perbandingan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB menghasilkan Nilai Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB sebesar 54,38 %. Kontribusi yang cukup besar ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial.

### 2. Nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB

Perbandingan nilai PMTB (aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto) dibagi dengan PDRB menghasilkan nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sebesar 6,95 %. Investasi berupa realisasi Belanja Modal pemerintah pusat dan daerah pada Triwulan III Tahun 2018, khususnya pada kegiatan produktif seperti infrastruktur. Asian Games merupakan investasi jangka panjang dengan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, renovasi Gelora Bung Karno dan wisma atlet di Kemayoran, mampu meningkatkan investasi pemerintah dan membuka lapangan kerja.

## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### 1. Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemprov DKI Raih Pemasukan Rp80 Miliar

Program pemutihan pajak untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) akan berakhir pada 31 Agustus 2018 atau akhir bulan ini. Terkait hal ini Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DKI Dwi Haryantono menyebut, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) DKI diperkirakan akan memperoleh pajak di akhir-akhir penutupan waktu pemutihan pajak. “Kemungkinan akan bertambah pada seminggu sebelum program pemutihan habis. Jadi Samsat itu bisa menerima PKB hingga Rp 80 miliar, biasanya 10 hari sebelum penutupan,” kata Dwi saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (20/8/2018).

Program pemutihan pajak merupakan program yang berikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai hadiah warga Jakarta pada HUT DKI Jakarta ke – 491 tahun pada Juni lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan total Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dibayar adalah Rp 1,6 triliun dari total pajak Rp 8,6 triliun.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/08/20/kebijakan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-pemprov-dki-raih-pemasukan-rp-80-miliar>.

### 2. Penghapusan Sanksi PKB, BBN-KB dan PBB-P2 Tahun 2018

Untuk merangsang animo dan menggugah kesadaran masyarakat membayar pajak maka pemberian stimulus kepada Wajib Pajak PBB-P2 dan PKB juga bertujuan dalam rangka tertib administrasi pembayaran pajak melalui penghapusan sanksi administrasi bunga keterlambatan pajak bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PBB-P2.

Penghapusan sanksi administrasi bunga keterlambatan ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Penghapusan sanksi administrasi dari PKB, BBN-KB dan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang dengan kesadaran sendiri membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2 terutang pada saat periode program penghapusan sanksi administrasi yang dilaksanakan dan diberlakukan kedalam sistem secara otomatis selama 54 hari Kalender sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Penghapusan sanksi administrasi PKB, BBN-KB dan PBB-P2 diberikan dari seluruh tunggakan yang ada, sedangkan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 diberikan kepada tunggakan PBB sejak tahun 2013 hingga tahun 2017.

(Humas Pajak Jakarta)